



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 April 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA
SUB UNIT KERJA : BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAIFUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
3. NHK : 104939

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 651.847.000**

1. Tanah Seluas 124 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 48.856.000
2. Tanah Seluas 102 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 40.188.000
3. Tanah Seluas 102 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 40.188.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/78 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 176.040.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/41 m2 di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 98.635.000
6. Tanah Seluas 3760 m2 di BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 17.440.000
7. Tanah Seluas 4588 m2 di BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 23.775.000
8. Tanah Seluas 10930 m2 di BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 49.360.000
9. Tanah Seluas 2898 m2 di BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 13.200.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/75 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 144.165.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 271.350.000**

1. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 13.600.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	848.683.268
F. HARTA LAINNYA	Rp.	136.000.000
Sub Total	Rp.	1.921.480.268
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.921.480.268

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.